



KINERJA KEPEMIMPINAN LEMBAGA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA ANYAR KECAMATAN BUAY PEMUKA BANGSA RAJA

Oleh Estalia¹, Muhamad Nanang Rifa'I², Rafika Rahmadani,³
estalia@gmail.com

¹ Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Universitas Nurul Huda

² Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Universitas Nurul Huda

³ Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan Universitas Nurul Huda

Abstrak- Kinerja kepemimpinan lembaga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja. Dalam urusan pemerintahan tepatnya diperdesaan atau kelurahan perlu adanya penilaian kinerja yang ada dalam suatu instansi daerah. Dengan harapan perkembangan dari kinerja kepemimpinan dan stafnya yang semua urusan pemerintahan desa diserahkan pada aparat daerah masing-masing. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa itu sendiri. Untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dengan melihat kaitan dari beberapa variabel yang ada. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif penelitian terdahulu.

Kata kunci : kepemimpinan, kinerja, pembangunan, desa anyar kec.bp bangsa raja

Abstract- The leadership performance of community institutions in improving the development of the new village of the buay sub-district, the leader of the king. In government affairs, to be precise in rural areas or sub-districts, it is necessary to have a performance assessment in a regional agency. It is hoped that the development of the performance of the leadership and staff will hand over all village government affairs to the respective regional officials. To obtain information about the current state by looking at the relationship of several existing variables.

Keywords: leadership, performance, development, new village kec.bp raja nation

PENDAHULUAN

Kepemimpinan merupakan akar dari suatu manajemen dalam mengambil keputusan yaitu inti dari seorang pemimpin. Seseorang yang telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin desa sudah pasti memiliki rancangan dalam pengambilan posisi itu. Tentunya seorang yang sanggup menjadi seorang pemimpin sudah memikirkan, merenungkan, dan memiliki angan-angan untuk

membangun desa serta masyarakat yang sejahteraan masyarakat desanya. Dari aspek-aspek keingan ini harus dipahami dan disanggupi setelah menjadi pemimpin desa yang harus dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelum menjadi pemimpin desa. Pembangunan daerah yaitu sudah menjadi suatu keharusan, tetapi pembangunan daerah harus bermanfaat untuk semua masyarakat daerah, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam

proses pembangunan sesuai dengan adanya visi misi yang telah dikatakan dan terlaksananya visi misi tersebut. Serta pertanyaan yang timbul sejauh mana kecekatan atau pemahaman dalam sebuah kepemimpinan yang ada dalam suatu visi misi yang telah ditetapkan sehingga dapat terkondisikan keterlaksanaan yang ada didalamnya. Berjalan tidaknya suatu visi misi terkondisinya suatu desa berdasarkan aspek yang telah disepakati dan diterapkan. Dengan demikian aspek tersebut terdapat filosofi pendekatan, perencanaan, pelembaan, pelaksanaan, pemanfaatan dalam pengevaluasian serta tanggung jawab. Dengan adanya suatu peningkatan dalam kinerja kepemimpinan untuk kesejahteraan masyarakat perlunya suatu dorongan agar dapat melakukan peningkatan dengan baik.

Peningkatan kinerja pemimpin desa tentunya tidak mudah sebab terdapat suatu tujuan yang didalamnya berkesinambungan dengan salah satu inovasi dan kreativitas yang ditingkatkan dalam kinerja. Sebagai pemimpin sudah harus menjadi pemeran yang serba bisa untuk menghadapi suatu tantangan kedepannya. Tantangan yang seperti apa dan bagaimana nanti mengkadapinya, pemimpin harus sigap dalam menyikapi permasalahan yang ada dimasyarakat desanya. Tetapi terkadang juga pemimpin desa kurang memperhatikan masyarakatnya dikarenakan kurangnya suatu pelayanan staf dari desa yang mengarahkan pada keadilan yang harus diterima oleh masyarakat desa anyar. Peningkatan dalam hal ini sangat perlu dipertanggung jawabkan sebab

kemajuan desa itu terfokus pada masyarakat serta pemimpinnya yang mendukung. Visi misi yang sudah ada dalam kepemimpinan haruslah diterapkan. Ini menjadi salah satu tujuan awal dari sebelum menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu pemimpin yang berkeinginan mengsejahterakan masyarakatnya didalamnya jadilah pemimpin yang memiliki prinsip dan keadilan bersama. Demikian hal ini disesuaikan dengan berkeinginan bahwa Negara sebagaimana keterteraan yaitu UUD 1945, dengan langkah yang awal harus dilakukan adalah menciptakan pemimpin pemerintahan yang bersih. Pemerintahan berperilaku adil dan bersih akan terwujud jika semua aparatur pemerintahan memiliki komitmen yang erat serta kuat, supaya tetap bertindak berdasarkan bersikap kesesuaian dengan nilai-nilai moral/norma yang terdapat pada Pancasila dan UUD 1945 serta ketentuan yang sudah berlaku.

Dengan begitu perlahan kesejahteraan masyarakat desa anyar akan meningkat dengan baik dan sudah dipastikan dengan pemimpin yang adil dan berprinsip masyarakat pun akan senang memiliki pemimpin yang seperti itu. Pembangunan desa sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal serta mengalami pasang surut didalamnya. Disini tujuan pembangunan sangat disesuaikan dengan hasil dari amanah Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang pada waktu itu yakni ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta adil dan makmur. Tetapi pada kenyataannya dapat kami lihat

didesa ini masih cukup jauh dari yang diharapkan (sugus, 2018)

Berdasarkan dari kategori pemikiran secara komprehensif disebabkan yang ada dalam definisi kepemimpinan yang mencakup dari karakteristik dari kepribadian, prilaku, dan kelompok. Dengan demikian kepemimpinan yang keterkaitan kepada individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dimasa depan.

- Pendekatan sifat (*the Traits Approach*) berusaha dalam memahami kepemimpinan yang baik dan memiliki kecerdasan, enerjik, percaya diri dll yang dapat menjadi pengaruh dimasyarakat.
- Pendekatan gaya (*the style Approach*) merupakan suatu prilaku yang mengkaji tindakan pemimpin dalam mempengaruhi gerakan pengikutnya dalam mencapai tujuan.
- Pendekatan kontingensi (*the contingency Approach*) yang mengukur gaya kepemimpinan berbasis tanggapan pemimpin terhadap karakter pekerjanya. Tokoh pendidikan Ki Hadjar dewantara, mengatakan dengan ajaran triloka”*ing ngarso sung telodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani*” dimana pemimpin dapat mengambil makna dari triloka. Seiring perkembangan muncul teori kepemimpinan transaksional yang dimana teori ini lebih mengarah pada tujuan-tujuan tugas, penyediaan sumber daya untuk pencapaian tersebut.

- Gaya kepemimpinan

(Virkutienė & Virkutyte, 202 C.E.) Dalam suatu organisasi terdapat berbagai makna dan hakikat yang harus dicapai tujuannya. Berdasarkan teori ini dapat dilihat adanya:

1. Kepemimpinan otoriter yaitu berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang.
2. Kepemimpinan partisipatif yaitu kerja sama saling menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para karyawan.
3. Kepemimpinan delegatif yaitu lebih mengarah pada wewenang yang bila mana karyawan diberi kebebasan dalam mengerjakan tugasnya dan mengambil kebijakan dalam keputusan.

Teori kepemimpinan situasional merupakan fungsi dari kemampuan dalam mengendalikan sumber daya manusia dengan adanya faktor dalam mencapai tujuan disetiap instansi atau organisasi. Dalam organisasi salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk memajukan kepemimpinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Dengan bertujuan ialah agar dapat menggambarkan suatu peristiwa atau objek baik yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Objek merupakan sebuah pengungkapan suatu masalah, keadaan, bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Dalam menggunakan metode dekriptif induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Schermerhon, Mengatakan bahwa kinerja dapat diukur baik secara individu, kelompok ataupun organisasi. Tinggi atau rendahnya kinerja ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian tugasnya. Aspek kuantitas ini mengacu pada beban kerja yang telah ditetapkan sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari rapi atau tidaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan (Wijaya, n.d.)

(Mamuja et al., 2021) Dalam pemerintahan desa kepentingan masyarakat sangat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa itu sendiri. Dengan begitu tanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakat berada ditangan kepemimpinan perdesaan dan pemerintah nasional antar kabupaten. Pemimpin desa harus berperan aktif dalam segala hal untuk mengatasi masalah yang ada dilapangan masyarakat. Kecapakan dalam kesejahteraan masyarakat harus diutamakan dalam suatu keadilannya suatu perhatian pemerintah desa lalu ke pemerintah kabupaten.

(Riswati & Susilawati, 2018) Faktor Internal (*dispositional*) merupakan dimana keterhubungan faktor dengan sifat-sifat dari seseorang. Misalnya dari keinerja seseorang baik karena mempunyai kemampuan tinggi ataupun seseorang itu mempunyai tipe pekerja keras, sedangkan berbeda dengan Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang dimana dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang datang berasal dari lingkungan. Seperti cara berperilaku, sikap, tindakan-tindakan rekan kerja, antar bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja serta iklim organisasi.

(Sandi & ., 2020) Kualitas pekerjaan dalam pemerintahan yang ada desa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja dapt dihasilkan oleh sumber daya manusia terutama yang terdapat di garis depan semestinya dapat mengajak untuk yang sedemikian dalam peningkatan kinerja dilembaga masyarakat. Demikianlah juga jika kita berkerja dengan baik dalam melayani masyarakat maka hasil dari kinerja kita pula akan baik dipandang serta dinilai langsung oleh masyarakat.

Dalam peningkatan proses hasil kerja yang baik akan menghasilkan kualitas hasil pekerjaan. Kualitas hasil kerja d a p a t diartikan sebagai tingkat baik atau buruknya sesuatu pekerjaan. Dengan tindakan pemerintah dalam hal melakukan proses layanan yang semakin meningkat kualitasnya maka akan menigkat pula kinerja lembaga msayarakat.

(Riswati & Susilawati, 2018) dalam proses peningkatan kinerja dari aparaturn lembaga masyarakat terdapat 5 (lima) aspek untuk mengukur kinerja tersebut, yaitu: 1) Kualitas Kerja (*Quality of Work*), 2) Ketepatan (*Promptness*), 3) Prakarsa (*Initiative*), 4) Kemampuan (*Capability*), 5) Komunikasi (*Communication*).

Kualitas Kerja (*Quality of Work*)

Quality of Work yang dari sini dapat dilihat saling keterkaitan dengan hasil kerja yang ditampilkan oleh staf kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepercayaan diberikan kepadanya. Artinya bahwa kualitas kerja merupakan suatu standar fisik yang dilakukan secara efektif dan efisien

Ketepatan (*Promptness*)

Yang dimaksudkan ketepatan dari sini dapat dilihat dari (keadaan, sifat) tepat, ketelitian, kejituan.

- 1) Tepat sendiri mengandung enam makna, yaitu “betul atau lurus, benar;
- 2) kena benar (pada sasaran, tujuan, maksud);
- 3) tidak ada selisih sedikit pun, tidak kurang tidak lebih, persis;
- 4) betul atau cocok (tentang dugaan, ramalan);
- 5) jitu (tentang tindakan, aturan, kritik);
- 6) betul atau mengena (tentang perkataan, jawaban)”.

Sebagai mana pemimpin ataupun pelaksanadapat bertugas dan fungsi serta kewenangan melalui menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka dari itu baik pimpinan maupun pelaksana harus bisa secara tepat mengambil keputusan disetiap tindakan yang akan dilakukannya, pemimpin juga harus berhati- hati dalam setiap tindakan, dan menjaga sikap dan perilaku yang baik ketika melakukan kegiatan tugas serta fungsinya.

Prakarsa (*Initiative*)

Inisiatif atau prakarsa yang muncul dari setiap aparatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana untuk meumbuhkan kompetensi dari keterkaitan antara aktivitas yang ada dalam kegiatan berorganisasi sehingga prakarsa ini sudah diatur dalam organisasi, agar dapat menjadi gerakan sebagai pendorong untuk menumbuhkan kompetensi dari aparat dan aktivitas

yang dilakukan oleh pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Kemampuan (*Capability*)

Kemampuan merupakan keterampilan yang dapat terlaksanakan semua tugas dengan baik. Dengan menggunakan peralatan serta keahlian yang dimiliki oleh diri sendiri” (Moerir, 2008: 116-117). Dari sini lah penunjuk pada pembawaan (*Capacity*) daripada kecakapan jasmani dan rohani seseorang, seperti mengingat-ingat, koordinasi perbagai kegiatan, ketajaman analisis, daya tahan tubuh. Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui latihan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dalam berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian berkomunikasi dengan baik menjadi salah satu aspek yang bisa membuat Sebuah organisasi pemerintah sangat membantu sehingga dapat berinteraksi secara luas. Pemerintah sangat membutuhkan komunikasi dalam setiap aktivitas, karena dengan terbangunnya komunikasi yang efektif baik secara internal maupun eksternal, memberikan dampak yang baik pula pada penyelenggaraan serta tugas-tugas organisasi. Komunikasi menurut Notoadmodjo (2007: 71) yaitu “proses dimana pengoperasian dorongan (*stimulus*) dalam bentuk lambang atau symbol dari bahasa maupun gerak (*non-verbal*), untuk memengaruhi

perilaku orang lain”. Tetapi dapat dihubungkan guna menimbulkan interaksi sosial (*social interaction*). Supaya tetap terjalinnya komunikasi yang baik, tercipta pula kesamaan persepsi tentang suatu kebijakan

(Wijaya, n.d.) Manusia dalam kehidupan melakukan interaksi dengan sesamanya. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya sebuah makna tidak hanya berinteraksi biasa saja melainkan beinteraksi secara mengarah kedalam peningkatan pembangunan kinerja. Manusia melakukan proses intepretasi melalui akal yang dimilikinya. Melalui teori motif yang dikemukakan oleh Alfred Schutz dalam buku *The Phenomenology of the Social World* menyatakan mengenai klasifikasi aksi yang dilakukan individu (Schutz, 1967). Tindakan merupakan aksi yang diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peningkatan kualitas lembaga masyarakat dapat diharapkan menjadi faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas. Adanya peningkatan dalam kualitas kinerja yang berkaitan dengan kegiatan dan bimbingan yang mengarahkan pada usaha untuk menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban yang sudah ada didalamnya. (Meltarini, 2020) Peningkatan motivasi manajemen kinerja dalam desa anyar kec. Buay pemuka bangsa raja yang dilakukan yaitu dengan memberikan insentif bagi staf kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Pengarahan dalam Pemberian insentif dapat berupa nilai tambah dari kinerja

itu sendiri. Supaya dapat menjadi dorongan untuk lebih efektif dalam bekerja serta memperhatikan masyarakat yang membutuhkan.

(Soesilo et al., 1979) Dalam kinerja kepemimpinan lembaga masyarakat untuk meningkatkan pembangunan yang ada desa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja. Salah satunya terdampak pada kecakapan pemimpin dalam pengarah pembangunan daerah harus mensinergiskan antara pembangunan kota dengan pembangunan perdesaan, hal ini agar adanya kaitan resiprokal, antara lain, tercermin atau tergambar pada tiga macam hubungan.

(Riswati & Susilawati, 2018) Pertama, dengan hubungan yang signifikan salah satunya diversifikasi dan peningkatan hasil produksi pertanian didalam perdesaan dengan pertumbuhan kecamatan sampai ke pertumbuhan kabupaten. Kedua, serta hubungan antara diversifikasi dan peningkatan hasil produksi pertanian salah satu harapan untuk menjadi pemimpin yang sigap dalam mendukung masyarakat untuk bertani dengan perkembangan teknologi. Ini merupakan salah satu kecakapan kinerja yang bisa dikatakan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat serta memahami apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketiga, ketergabungan yang signifikan antara fluktuasi kesempatan kerja sektor agraris di perdesaan dengan arus urbanisasi.

(Hasan & Eviany, 2018) Dalam meningkatkan pembangunan desa tidak lepas dari perekonomian yang ada dalam masyarakat desa dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat sekitar untuk pembangunan dilihat dari pendapatan masyarakatnya. Masyarakat didesa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja mayoritas berpendapatan sebagai pertanian, berkebun karet, dan ada juga berkebun sayur mayur. Tetapi dalam perdesaan perdalaman perekonomiannya masih mengalami kesulitan dikarenakan dalam setiap panen raya padi petani mengalami penurunan harga pagi yang tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Meskipun begitu bagi petani tidak ada ada pilihan lain akibatnya padi yang dipanen terpaksa dijual dengan harga yang rendah. Kesulitan ini terjadi karena kurangnya rasa keempatian antara pembeli padi dengan kepala desa dan dampaknya pun berimbas pada masyarakat yang bertani. Dengan demikian koordinasi antara kepala desa dengan kecamatan untuk menemukan solusi dari permasalahan ketidak stabilan harga padi yang semakin menurun.

(Siregar, 2018) Dari sini pemerintah desa harus saling memperhatikan bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Dari sini perhatian serta dukungan kepada masyarakat akan berdampak baik untuk peningkatannya.

(Rahardjanto, 2020) Dari analisis berikut agar dapat dilakukan perbandingan sektor unggulan adalah

Tipologi Klassen. Maka dari itu dilakukan perbandingan kontribusi dari masing-masing sektor lapangan usaha dan pertanian didesa anyar dengan kontribusi pertumbuhan sektor lapangan usaha masing-masing sektor lapangan usaha dan pertanian dengan pertumbuhan kecamatan buay pemuka bangsa raja. Dari pemerintah kecamatan buay pemuka memperhatikan serta memberikan prioritas pembangunan dari sector diatas agar dapat bersaing dengan daerah lainnya.

(Arwanto, 1979) Dalam pengkoordinasi yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu organisasi bertujuan berdasarkan keinginan untuk mencapai tujuannya. Demikian dalam aktivitasnya ada yang bersifat non formal dalam arti kelompok non formal tersebut menjelaskan pola hubungan serta kerja secara teratur berdasarkan tindakannya sehingga dalam hal ini dapat tercermin serta terkoordinasi di antara kelompok non formal tersebut. Koordinasi merupakan pencapaian usaha, pertanian, dan perkebunan didesa masing-masing secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

(Emmy, 2020) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Camat buay pemuka bangsa raja dalam Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu:

- Informasi, dalam sebuah instansi pemberian informasi terkait perkembangan yang ada dalam wadah intitusi sangat diutamakan

sehingga staf instansi dapat mengkoordinasikan data yang ada

- Komunikasi merupakan cara yang sangat efektif dalam mendapatkan informasi yang terupdate
- Teknologi Informasi Fungsi koordinasi Camat buay pemuka bangsa raja terhadap ketersediaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk menyampaikan masalah yang ada, sehingga dalam menjalankan fungsi untuk koordinasinya, dapat dikatakan mulai berjalan dengan kemajuan zaman. (Adila, 2011)

(Cohen & Lee, 1979) Solusi dari permasalahan di atas salah satunya adalah dengan menerapkan standar ketenaga kerjaan. Dengan penerapan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga dapat menyelesaikan masalah demi masalah yang ada dalam masyarakat desa. (Rahardjanto, 2020). Dengan demikian berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat bahwa tidak hanya bidang pertanian saja melainkan juga bisa dari bidang perdagangan atau biasa disebut pasar. Pasar merupakan wadah dalam perekonomian, didalam pasar terdapat tenaga kerja yang harus bisa mengatur masyarakat yang berdasarkan norma dan standar etika. Tenaga kerja pasar dapat mempromosikan barang dagangan yang ada sehingga dapat menarik pembeli yang tadinya tidak tertarik. Dari hal ini merupakan trik untuk meningkatkan pendapatan hasil jual. Dengan penerapan standar tenaga kerja yang ada maka akan

menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas baik juga dalam pertumbuhan perekonomian yang ada dalam masyarakat desa. Sedangkan, setiap campur tangan dalam perdagangan karena alasan tenaga kerja akan menurunkan keuntungan dari perdagangan.

KESIMPULAN

Kepemimpinan merupakan akar dari suatu manajemen dalam mengambil keputusan yaitu inti dari seorang pemimpin. Seseorang yang telah memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin desa sudah pasti memiliki rancangan dalam pengambilan posisi itu. Tentunya seorang yang sanggup menjadi seorang pemimpin sudah memikirkan, merenungkan, dan memiliki angan-angan untuk membangun desa serta masyarakat yang sejahteraan masyarakat desanya. Dalam kinerja kepemimpinan lembaga masyarakat untuk meningkatkan pembangunan yang ada desa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja. (APRIANTO, 2018). Salah satunya terdampak pada kecakapan pemimpin dalam pengarahannya pembangunan daerah harus mensinergiskan antara pembangunan kota dengan pembangunan perdesaan, hal ini agar adanya kaitan resiprokal. (Cohen & Lee, 1979) Solusi dari permasalahan di atas salah satunya adalah dengan menerapkan standar ketenagakerjaan. Dengan penerapan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga dapat menyelesaikan masalah demi masalah

yang ada dalam masyarakat desa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa masyarakat serta pemimpin desa harus saling berkoordinasi antara kepala desa dengan camat. Dengan demikian berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat bahwa tidak hanya bidang pertanian saja melainkan juga bisa dari bidang perdagangan atau biasa disebut pasar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan demikian kami ucapkan terimakasih terhadap pemerintah ogan komering ulu timur yang mana telah mendukung penulisan artikel kinerja kepemimpinan lembaga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja ini serta memberikan informasi baik dan cepat sehingga penulisan ini terselesaikan. Dan tidak terlupakan kami ucapkan terimakasih kepada pimpinan kampus H. Imam Rodin, M.Pd yang telah memberikan kesempatan terhadap kami untuk mempelajari lebih banyak lagi tentang masalah-masalah yang ada dalam kinerja kepemimpinan lembaga masyarakat dalam pembangunan desa anyar kecamatan buay pemuka bangsa raja. Dan kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami Bapak M. Nanang Rifa'i, M, Pd dan Ibu Rafika Rahmadani, M.Pd yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adila, I. (2011). SPASIALISASI
DALAM EKONOMI POLITIK
KOMUNIKASI (Studi Kasus

MRA Media). *Jurnal Ilmu
Komunikasi*, 1(1), 93–108.

APRIANTO, N. E. K. (2018).
Kemiskinan Dalam Perspektif
Ekonomi Politik Islam.
*ISLAMICONOMIC: Jurnal
Ekonomi Islam*, 8(2), 169–188.
<https://doi.org/10.32678/ijej.v8i2.60>

Arwanto, W. A. (1979). 1 , 2 1,2. 14(2).

Emmy, E. (2020). Efektivitas Camat
Dalam Mengoordinasikan
Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Kecamatan Cileunyi Kabupaten
Bandung. *Jurnal Politik
Pemerintahan Dharma Praja*,
11(1), 25–40.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.965>

Hasan, E., & Eviany, E. (2018).
Meningkatkan Kualitas Sumber
Dayaaparatur Negara (Asn) Dalam
Mewujudkan Indonesia Bersih.
*Jurnal Politik Pemerintahan
Dharma Praja*, 11(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.963>

Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey,
A. (2021). Efektivitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa. *Jurnal
Akuntansi Manado (JAIM)*, 249–
258.
<https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>

Meltarini, M. (2020). Perlukah
Manajemen Perubahan Bagi
Pemerintah Kabupaten Sumedang.
*Jurnal Politik Pemerintahan
Dharma Praja*, 11(1), 11–24.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.964>

- Rahardjanto, T. (2020). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kota Jambi. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 41–50.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.966>
- Riswati, R., & Susilawati, S. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Jatigede Oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 121–135.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.401>
- Sandi, J. R. A., & . S. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 1–13.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1072>
- Siregar, K. (2018). Optimalisasi Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(2), 93–106.
<https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i2.400>
- Soesilo, N. I., Perencanaan, P., Pembangunan, K., Ekonomi, F., Indonesia, U., & Pusat, K. J. (1979). *e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857 Website : <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP> Faculty of Politics Governance , Governance of Home Affairs (IPDN)* **DETERMINAN DAN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA * corresponding author. 14(1), 94–110.**
- sugus, permen. (2018). *Kepemimpinan 5 “Teori kepemimpinan.”* <https://doi.org/10.31219/osf.io/bzvqu>
- Virkutienė, O., & Virkutyte, Jū. (202 C.E.). *Scanned by CamScanner × è ÆÃ µÃ ÉÏ æ « Īó Scanned by CamScanner* (Issue August).
- Wijaya, R. (n.d.). *Kinerja pegawai kantor kecamatan ilir barat i kota Palembang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 69–96.*